

Dinamika Pembangunan Madrasah di Kota Bogor pada Era PELITA V

Bimo Adriawan¹, Arditya Prayogi^{2*}

¹Universitas Padjadjaran, ²UIN KH Abdrurahman Wahid Pekalongan

¹bimo.adrn@rocketmail.com, ²arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

***Abstract:** Historical descriptions using quantitative data such as the Human Development Index (IPM) in a region are still not widely found because quantitative HDI data are more often the domain of socio-economic sciences, especially development economics. With this background, this article aims to provide a description of the various statistical data by which a historical work with a complete story can be described. The city of Bogor has a long history in the aspect of formal-religious education because Bogor in development planning during the Dutch East Indies era was directed as an administrative center city. This condition continued until the New Order period through the five-year development program (PELITA). This article was prepared using the historical method which consists of four stages of work, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. From the results of the review, it can be seen that the education development policy carried out by the Bogor city government in collaboration with the Ministry of Religion is guided by the development plans of the central government and local conditions. Education policy is directed at the physical and non-physical development of madrasahs at various levels where during the five years of policy implementation during PELITA V, in general it has progressed.*

***Keywords:** Madrasah, HDI, Development, Education*

PENDAHULUAN

Cepat maupun lambat, dinamika suatu wilayah akan sangat tergantung pada manusia penghuninya (Abdullah, 2005). Dinamika suatu kota juga akan sangat bergantung pada berbagai faktor, baik fisik maupun non fisik. Untuk dapat mengetahui dinamika tersebut, digunakan berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dinamika tersebut ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dikenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1990 yang mengukur dinamika berupa kemajuan suatu wilayah dengan melihat pada tiga aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Siagian, 1982). Ulasan terkait IPM menjadi hal yang menarik karena ketiga aspek

IPM, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah secara luas.

Dalam kajian sejarah, ulasan historis dengan berbasis pada data IPM masih jarang ditemui. Hal ini karena data-data IPM dalam suatu wilayah masih sering digunakan oleh ilmu-ilmu sosial lain, terutama ilmu ekonomi pembangunan. Namun demikian, sejarah juga dapat menempatkan diri sebagai suatu ilmu yang mengkaji aspek IPM suatu wilayah, utamanya terkait dengan dinamika manusia didalamnya yang berkaitan erat dengan sejarah pembangunan. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan pendekatan tersendiri agar sejarah dapat menangkap makna dari data-data pembangunan (berupa statistik IPM) agar karya sejarah yang terbangun (historiografi) dapat secara utuh tergambar (Prayogi, 2022).

Kota Bogor adalah salah satu kota yang menggunakan IPM sebagai alat ukur perkembangan kota. Data-data indikator statistik IPM Kota Bogor dapat ditemukan dalam buku seri yang berjudul Kota Bogor dalam Angka dan Jabar dalam Angka, yang mana kedua buku ini merupakan bagian dari seri penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Buku ini memuat data statistik yang sangat komprehensif meliputi berbagai data statistik geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata, keuangan dan harga-harga, serta pendapatan regional. Seluruh data yang ada dalam seri penerbitan ini berupa data statistik.

Tiga aspek yang digunakan untuk mengukur IPM pun dimuat dalam buku ini. Tiap tahunnya data-data ini senantiasa mengalami perubahan. Perubahan data tersebut terjadi tergantung kepada kebijakan pemerintah kota. Sera konseptual, perubahan angka-angka statistik ini tidak banyak diulas. Di sisi lain, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terjadinya perubahan yang kemudian direkam dalam angka statistik. Dinamika seperti ini kemudian tidak dimuat dalam seri penerbitan dari Badan Pusat Statistik yang cenderung sinkronis. Hal demikianlah yang menjadi latarbelakang penulisan artikel ini. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan telaah pada berbagai data statistik tersebut yang dengannya dapat tergambar suatu historiografi dengan cerita yang utuh. Di antara tiga aspek IPM, penulis memfokuskan pembahasan di bidang pendidikan. Alasannya adalah karena pendidikan adalah dasar bagi kemakmuran ekonomi dan kesehatan. Perlu pula diingat, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia salah satunya berasal dari sumbangsih kelas intelektual- terdidik.

Kota Bogor memiliki sejarah yang panjang (Drakeley, 2005). Keterkaitan kota Bogor dengan aspek pendidikan (formal) telah dimulai pada masa Hindia-Belanda. Kota Bogor –yang menjadi bagian wilayah Buitenzorg, dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai kota pusat administrasi dan pemerintahan. Pembangunan gedung Algemene Secretarie di Buitenzorg merupakan bukti kesungguhan pemerintah Hindia-Belanda kala itu (Zakaria, 2010). Sebagai konsekuensi dari pembangunan kota pusat administrasi dan pemerintahan, maka

kebutuhan akan tenaga kerja terdidik menjadi meningkat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu, pemerintah Hindia-Belanda membangun berbagai sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi (Ricklefs, 2001).

Pemerintah Hindia-Belanda juga membangun beberapa lembaga penelitian terkait pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ternyata, pemerintah Hindia-Belanda tidak hanya memproyeksikan Buitenzorg menjadi pusat administrasi dan pemerintahan tetapi juga menetapkannya sebagai pusat penelitian tanaman tropis dan perkebunan yang ditandai dengan dibangunnya Kebun Raya (plantetuin) (Zakaria, 2010). Jadi, Bogor telah memiliki kaitan erat dengan pendidikan dari masa kolonial Belanda.

Dinamika pembangunan pendidikan terus berlangsung di hingga masa Orde Lama. Di masa ini, perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Kota Bogor menjadi semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi perguruan tinggi mandiri terpisah dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1963. Dinamika pemerintahan yang beralih dari Orde Lama ke Orde Baru semakin menegaskan bahwa aspek pendidikan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan politik kenegaraan (Tirtosudarmo, 1994). Titik tekan aspek pembangunan pendidikan ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jenjang tersebut merupakan jenjang yang sangat mendasar. Sebagai pondasi, pembenahan pendidikan harus dimulai dari jenjang dasar dan menengah, terutama dalam hal pemerataan.

Perumusan pembangunan pendidikan Orde Baru dilaksanakan secara serius pada masa Pelita V. Berdasarkan GBHN 1988 memberikan arahan kepada pembangunan Pelita V. Di dalamnya terdapat dua tujuan Pelita V, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata. Kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Dari arahan GBHN 1988, dapat diketahui bahwa salah satu fokus pembangunan pada 1989-1994 adalah pendidikan. Namun demikian, terdapat ketimpangan pembangunan pendidikan di Kota Bogor pada masa ini. Pembangunan yang seharusnya berdampak pada peningkatan jumlah sekolah dan peningkatan murid, pada kenyataannya justru menurun. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengungkap secara historis dinamika pembangunan pendidikan di kota Bogor di masa ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 2006). Tahapan pertama adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* yang artinya menemukan (Lubis, 2008: 17). Tahapan pertama ini adalah tahapan untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, sumber primer yang berasal dari pelaku atau saksi dan sumber sekunder yang berasal dari selain pelaku atau saksi (Kuntowijoyo,

2003). Pencarian sumber dilakukan di kantor arsip kota Bogor, perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat, perpustakaan Universitas Padjadjaran, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sumber yang telah dicari dan dikumpulkan kemudian diseleksi. Tahap penyeleksian sumber disebut tahap kritik. Kritik dapat dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan seleksi terhadap kredibilitas sumber. Indikatornya adalah kemampuan sumber dalam mengungkapkan peristiwa. Hal itu dapat dilihat dari kehadiran sumber dalam peristiwa, keahlian sumber, dan kedekatan sumber dengan peristiwa. Indikator selanjutnya adalah kemauan sumber dalam mengungkapkan peristiwa (Lubis, 2008: 30-34). Kritik ekstern adalah seleksi terhadap otentisitas sumber, dengan melakukan pengujian terhadap bahan sumber, meliputi material kertas, tinta, watermark, jenis huruf, gaya bahasa, dan tanggal yang ada pada sumber.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berupa data statistik. Penyeleksian data statistik adalah dengan melihat data statistik tahun satu pada data statistik tahun berikutnya. Umumnya, data statistik misalnya tabel jumlah sekolah tahun 1988. Dibawahnya ada informasi jumlah pada tahun 1987, 1986, dan 1985. Dengan begitu ada irisan antara satu data dengan data lainnya. Apabila tahun utama semisal tahun 1988 sama dengan tahun informasi 1988 di tabel tahun 1989 maka kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan lainnya adalah dengan mengumpulkan data dari dinas terkait, dalam hal ini data statistik yang dimiliki oleh dinas pendidikan. Setelah sumber diseleksi, maka akan terkumpul data yang perlu dimaknai. Proses pemaknaan data merupakan tahapan ketiga dalam metode sejarah, yaitu tahap interpretasi. Data yang telah dimaknai adalah fakta. Fakta yang ditemukan harus mendapat dukungan dari fakta-fakta lainnya, yang disebut proses koraborasi. Setelah semua proses dilakukan, proses selanjutnya adalah penulisan sejarah yang disebut dengan tahap historiografi. Pada tahap ini semua fakta disusun menjadi bentuk narasi yang kronologis (Kartodirjo, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pembangunan Pendidikan Pra Pelita V

Kota Bogor terletak pada $106^{\circ}43'30''$ sampai $106^{\circ}51'00''$ Bujur Timur dan $30^{\circ}30'' - 6^{\circ}41'00''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 118.50 Km². Dalam kondisi spasial tersebut, kota Bogor memiliki 47.903 Rumah Tangga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 241.456 jiwa pada 1988. Jadi, rata-rata Rumah Tangga memiliki lima orang anggota. Tahun berikutnya, jumlah rumah tangga bertambah sekitar 3.2% menjadi 49.527 Rumah Tangga. Pertambahan tersebut berdampak pada jumlah Anggota Rumah Tangga yang juga meningkat, sekitar 3% menjadi 248.829 jiwa (Badan Pusat Statistik, 1990). Rata-rata anggota rumah tangga tetap lima orang per rumah tangga. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penduduk Kota Bogor 1988-1989

| Tahun | Rumah Tangga (RT) | Anggota Rumah Tangga (ART) | | Jumlah |
|-------|-------------------|----------------------------|-----------|---------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1988 | 47.983 | 120.458 | 120.998 | 241.456 |
| 1989 | 49.527 | 123.457 | 125.372 | 248.829 |

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Secara demografis, persebaran penduduk banyak terdapat di wilayah Bogor utara. Penyebabnya adalah wilayah Bogor utara adalah wilayah terdekat dengan Jakarta. Terdapat penduduk kota Bogor yang bekerja di Jakarta. Oleh karena itu wilayah utara menjadi pilihan utama bagi para penglaju. Kedekatan geografis dan posisi kota Bogor yang merupakan satelit dari Jakarta sangat memungkinkan hal tersebut. Wilayah terpadat selanjutnya secara berurutan adalah Bogor timur. Bogor selatan, Bogor barat dan Bogor tengah (Badan Pusat Statistik, 1990).

Pada tahun ajaran 1988/1989 juga telah banyak lembaga pendidikan dengan yang dikelola oleh Departemen Agama untuk jenjang dasar dan menengah. Lembaga pendidikan itu adalah madrasah yang untuk tingkat dasar disebut madrasah ibtidayah (MI) setara dengan SD. Untuk jenjang menengah pertama adalah madrasah tsanawiyah (MTs) setara dengan SMTP. Lembaga yang setara dengan SMTA adalah madrasah aliyah (MA). Ketiga madrasah tersebut dikelola baik oleh pemerintah dengan label negeri dan juga swasta. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Madrasah, Guru, dan Murid Negeri dan Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bogor Tahun Ajaran 1988-1989

| 1988/1989 | MI | MTs | MA | Jumlah |
|-----------|-------|-------|-------|--------|
| Madrasah | 14 | 6 | 7 | 27 |
| Guru | 81 | 90 | 110 | 281 |
| Murid | 1.764 | 2.286 | 1.529 | 5.561 |

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah seluruh madrasah jenjang dasar dan menengah di Kota Bogor adalah 27 madrasah pada tahun ajaran 1988/1989. Dari ketiga jenjang, jumlah MI lebih banyak dari kedua jenjang lainnya. Jumlah murid dari 14 sekolah tingkat MI adalah 1.764 orang. Rata-rata murid per sekolah adalah 126 murid. Untuk mengajar murid tersebut tersedia 81 orang guru. Rata-rata guru per madrasah adalah lima orang guru dan rasio guru dan murid tingkat MI adalah 1:21.

Pada tingkat MTs, jumlah madrasah yang tersedia adalah enam sekolah. Jumlah tersebut merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan dua jenjang lainnya. Jumlah murid yang menempuh pendidikan di enam MTs adalah 2.286 orang. Rata-rata murid per madrasah adalah 381 murid. Tersedia sembilan puluh guru yang mengajar di tingkat MTs. Dengan begitu, rasio guru dan murid adalah 1:25.

Jenjang pendidikan menengah teratas adalah MA. Jumlah MA di Kota Bogor tahun ajaran 1988/1989 adalah tujuh madrasah. Murid yang bersekolah di tujuh MA yang ada di Kota Bogor adalah 1.529 orang. Dapat diketahui bahwa jumlah murid rata-rata per madrasah adalah 218 murid. Dalam menyelenggarakan pendidikan, MA memiliki guru sebanyak 281 orang. Dengan begitu, rata-rata guru per madrasah adalah 40 orang guru dan rasio guru dan murid adalah 1:5.

Kebijakan Pembangunan Pendidikan pada Pelita V

Pemerintah kota Bogor adalah pelaksana kebijakan di tingkat kota. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bogor berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat (Bappenas, 1989) dengan memperhatikan permasalahan dan potensi daerah (Badan Pusat Statistik, 1990) (Bappeda Kota Bogor, 1989). Kebijakan pembangunan pendidikan pemerintah kota Bogor terbagi dalam empat bagian, yaitu; sub sektor pendidikan dasar, pendidikan lanjutan tingkat pertama, pendidikan lanjutan tingkat atas, dan pendidikan tingkat tinggi.

Sub Sektor Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar meliputi sekolah dasar (SD) sederajat. Kebijakan pembangunan pendidikan dasar tahun 1989-1994 berangkat dari kondisi masyarakat Kota Bogor masa Pelita IV. Pertumbuhan jumlah anak pada akhir Pelita IV adalah 3%. Dalam pendidikan dasar, persentase tersebut tergolong tinggi karena tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan sekolah dasar. Di samping timpangnya jumlah anak dengan sekolah, terdapat penyebab lain terhambatnya anak usia 7-12 tahun untuk menempuh pendidikan dasar (Bappeda Kota Bogor, 1989) (Simandjuntak & Pasaribu, 1986). Penyebab dapat diklasifikasikan dalam empat dimensi, yaitu:

Dimensi Murid

1. Dimensi ini mencakup kepada daya tampung yang tidak seimbang seperti yang dijelaskan sebelumnya.
2. Orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.
3. Keterbatasan jumlah tenaga guru.
4. Masuknya murid usia SD dari luar Kota Bogor.
5. Beban mental dari calon siswa karena keterbatasan fisik.

Dimensi Guru

Rasio rata-rata guru dengan murid kota Bogor akhir Pelita IV tergolong cukup. Namun, persebarannya yang tidak merata pada sekolah negeri atau swasta merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Permasalahan ini secara tidak langsung menghambat anak usia 7-12 tahun untuk bersekolah.

Dimensi Sarana dan Prasarana

Jumlah sekolah belum mampu mengimbangi jumlah murid secara proporsional. Akibatnya banyak murid usia 7-12 tahun yang belum masuk sekolah.

Dimensi Partisipasi Masyarakat

Masyarakat belum secara aktif terlibat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar. Bentuk nyata seperti sekolah dasar swasta masih dibutuhkan mengingat belum seluruhnya anak usia 7-12 tahun tertampung.

Kondisi di atas, menjadi pertimbangan pemerintah kota Bogor dalam mengambil kebijakan. Tujuan dari pembangunan pendidikan dasar 1989-1994 adalah memberi dan memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-12 tahun. Hal itu sejalan dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi pendidikan kota pada 1988/1989, pemerintah kota Bogor mengeluarkan tujuh kebijakan pembangunan pendidikan dasar (Bappeda Kota Bogor, 1989). Kebijakannya, antara lain;

1. Rehabilitasi sekolah
2. Penambahan jumlah dan kualitas guru.
3. Pengoptimalan SD yang telah ada dengan membatasi jumlah maksimal shift sekolah menjadi dua.
4. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan SD.
5. Bantuan kepada orang tua yang kurang mampu dengan program orang tua asuh.
6. Rayonisasi untuk murid baru dalam upaya pengendalian arus masuk murid baru dari luar Kota Bogor.
7. Optimalisasi penyuluhan wajib belajar.

Tujuh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bogor bermuara pada tiga upaya, yaitu penambahan jumlah sekolah, guru, dan murid. Ketiganya saling berkaitan. Perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 7-12 tahun tentu membutuhkan jumlah sekolah yang memadai (Gunardi & Wijaya, 1997). Pun dengan jumlah guru yang perlu diselaraskan dengan jumlah murid agar proses belajar-mengajar efektif.

Sub Sektor Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama

Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan pembangunan pendidikan lanjutan tingkat pertama. Pembangunan sekolah lanjutan pertama merupakan suatu kewajiban karena ini merupakan jenjang studi lanjutan dari SD sederajat. Lulusan SD sederajat belum mempunyai kemampuan yang memadai, oleh karena itu lulusan SD sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan menjadi angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan.

Angkatan kerja tak terampil lulusan SD sederajat juga menjadi perhatian pemerintah kota Bogor. Sekolah lanjutan tingkat pertama akhir Pelita IV belum

mampu menampung seluruh lulusan SD sederajat. Kebutuhan pembangunan sektor lanjutan tingkat pertama semakin mendesak karena pertumbuhan jumlah anak sebesar 3%/tahun. Pertumbuhan ini secara langsung menambah jumlah anak usia sekolah yang menempuh pendidikan dasar dan lulusannya yang perlu melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama.

Penambahan sekolah dalam upaya mengimbangi lulusan SD sederajat tentu memerlukan penambahan jumlah guru pula. Akhir Pelita IV, jumlah guru sekolah lanjutan pertama masih terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh keterbatasan perguruan tinggi menyiapkan calon guru dan proses pengangkatan calon guru yang memakan waktu lama. Kondisi lainnya adalah minimnya SMTP kejuruan. Pendidikan yang dilangsungkan di SMTP umum adalah untuk mempersiapkan murid melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan atas. Lulusan SMTP umum yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan atas menjadi angkatan kerja yang belum terampil. Oleh karena itu, SMTP kejuruan perlu disiapkan sebagai solusi permasalahan ini (Gunardi & Wijaya, 1997).

Berdasarkan kondisi pendidikan lanjutan pertama akhir Pelita IV, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan (Bappeda Kota Bogor, 1989), yaitu:

1. Pembangunan sekolah yang merata.
2. Penambahan tenaga guru dan optimalisasi tenaga guru yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan perpanjangan masa tugas guru, penyederhanaan proses pengangkatan, penempatan, dan perpindahan calon guru, serta peningkatan kesejahteraan guru.
3. Peningkatan partisipasi sekolah swasta. Hal ini dilakukan dengan bantuan sarana dan prasarana, tenaga teknik, dan sistem akreditasi. Kebijakan ini dilaksanakan untuk menampung lulusan SD dan menyehatkan persaingan antar sekolah negeri dan swasta.
4. Membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.
5. Membatasi arus murid baru masuk ke kota Bogor.

Lima kebijakan di atas dapat dibagi dalam dua poin yang saling menunjang. Pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana. Penambahan sekolah berarti penambahan jumlah guru. Pemerintah juga melibatkan pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana. Di samping itu, penyediaan sekolah lanjutan pertama kejuruan merupakan solusi untuk mengatasi lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Pembangunan sekolah kejuruan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Tujuan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana berkait dengan poin yang kedua yaitu, perluasan kesempatan sekolah. Semakin luas kesempatan sekolah tentu semakin tinggi permintaan akan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kedua poin ini saling berkaitan. Dalam upaya perluasan kesempatan sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu (Simandjuntak & Pasaribu, 1986).

Sub Sektor Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas

Seperti pendidikan lanjutan tingkat pertama, sektor pendidikan lanjutan tingkat atas merupakan jenjang pendidikan yang harus ditempuh oleh lulusan SMTP umum sederajat. Keharusan ini disebabkan pendidikan lanjutan tingkat pertama bertujuan untuk menyiapkan murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lulusan SMTP sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan menjadi angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan lanjutan tingkat atas. Seperti halnya kebijakan pada tingkat pendidikan sebelumnya, kondisi tingkat atas menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan (Simandjuntak & Pasaribu, 1986).

Akhir Pelita IV, pendidikan lanjutan tingkat atas belum dapat menampung seluruh lulusan SMTP sederajat. Lulusan yang tidak tertampung menjadi angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan. Guna menghindari hal itu, pembangunan sekolah menjadi jalan keluar yang relevan. Kebutuhan untuk membangun sekolah baru perlu diimbangi dengan penyediaan tenaga guru yang memadai. Kondisi ini sama seperti kondisi guru pada jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama. Permasalahan terbatasnya penyediaan guru dari perguruan tinggi dan lamanya proses pengangkatan calon guru menjadi penyebab kurangnya jumlah guru.

Kondisi lainnya adalah terbatasnya jumlah sekolah kejuruan. Sekolah umum mengarahkan murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu perguruan tinggi. Sama seperti lulusan jenjang lanjutan pertama, lulusan jenjang lanjutan atas yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi akan menjadi angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan (Tikson, 2005). Oleh karena itu, sekolah kejuruan dibutuhkan guna menyelesaikan persoalan ini.

Berpedoman pada program pembangunan pemerintah pusat dengan memperhatikan kondisi lokal, Pemerintah kota Bogor mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan lanjutan tingkat atas (Bappeda Kota Bogor, 1989), sebagai berikut.

1. Pembangunan SMTA dan SMTA kejuruan dalam upaya untuk mengimbangi lulusan SMTP sederajat.
2. Penambahan tenaga guru terutama guru SMTA kejuruan.
3. Pembinaan SMTA swasta untuk menampung jumlah lulusan SMTP sederajat. Bantuan tenaga guru, sarana dan prasarana, dan penerapan sistem akreditasi menjadi pilihan pemerintah dalam rangka pembinaan SMTA swasta.
4. Pembebasan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.
5. Membatasi arus murid baru SMTA sederajat masuk ke kota Bogor.

Kebijakan pembangunan pendidikan tingkat lanjutan atas serupa dengan jenjang sebelumnya. Fokus tetap pada penyediaan sekolah, guru, dan perluasan kesempatan belajar. Ketiga fokus ini sejalan dengan program pembangunan

pendidikan pemerintah pusat. Hal penting lainnya adalah stimulasi pihak swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan.

Keterbatasan daya tampung perguruan tinggi berakibat pada banyaknya lulusan SMTA sederajat yang menjadi angkatan kerja yang belum terampil. Seperti halnya jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama, sekolah kejuruan kembali menjadi pilihan pemerintah untuk menciptakan lulusan yang terampil. Sekolah kejuruan juga melibatkan swasta. Keterlibatan swasta pada penyediaan sekolah kejuruan dan umum membantu pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat (Illich, 2000). Akhir Pelita IV, jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Namun, meningkatnya jumlah lulusan SMTP sederajat mengharuskan pemerintah menyediakan sekolah dan semakin melibatkan swasta dalam penyediaan sekolah umum maupun kejuruan.

Dinamika Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bogor pada PELITA V

Pendidikan dasar merupakan awal dari rangkaian panjang pendidikan. Pendidikan dasar mendapat perhatian dari pemerintah dengan adanya kebijakan khusus. Pendidikan dasar sendiri terdiri dari dua jenjang, yaitu taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) sederajat. Tabel berikut menggambarkan kondisi MI di Kota Bogor tahun 1989-1994.

Tabel 3. Jumlah Madrasah, Murid, dan Guru MI di Kota Bogor 1989-1994

| TAHUN | Madrasah | Murid | Guru | Rasio |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1989 | 19 | 1.862 | 89 | 20:1 |
| 1990 | 19 | 2.327 | 130 | 18:1 |
| 1991 | 19 | 2.327 | 130 | 18:1 |
| 1992 | 29 | 3.459 | 289 | 11:1 |
| 1993 | 29 | 3.518 | 245 | 14:1 |
| 1994 | 29 | 3.518 | 245 | 14:1 |

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas, jumlah madrasah ibtidayah adalah sembilan belas madrasah pada tahun ajaran pertama pelaksanaan kebijakan. Murid yang bersekolah di sembilan belas madrasah itu adalah 1.862 murid, rata-rata 98 murid/madrasah. Guru yang tersedia untuk madrasah ibtidayah berjumlah 89 guru. Rasio guru dan murid tahun 1989 adalah 1:20.

Pada tahun berikutnya, jumlah murid dan guru meningkat sedangkan sekolah tetap. Jumlah murid bertambah sebanyak 465 orang menjadi 2.327 orang. Pertumbuhan jumlah murid berbanding lurus dengan guru. Jumlah guru bertambah sebanyak 41 orang menjadi 130 orang. Dampak pertumbuhan ini rasio guru dan murid mengalami peningkatan dari 1:20 menjadi 1:18.

Jumlah madrasah ibtidayah pada 1992 bertambah sepuluh madrasah menjadi 29 madrasah. Jumlah tersebut bertahan sampai tahun terakhir pelaksanaan kebijakan. Sepuluh madrasah tumbuh dalam waktu tiga tahun menandakan bahwa madrasah memiliki peminat yang banyak. Rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai tiga sekolah. Berbeda dengan sekolah umum yang jumlahnya tetap.

Pertumbuhan madrasah ibtidayah berbanding lurus dengan jumlah murid. Murid madrasah ibtidayah jumlahnya cenderung meningkat. Seperti disebutkan sebelumnya, penambahan jumlah murid terjadi pada 1990 sebanyak 130 orang dari 1989. Jumlah murid sebanyak 2.327 orang pada tahun 1990 terus bertahan sampai 1991 dimana jumlah madrasah ibtidayah bertambah menjadi 29 madrasah.

Pada 1992, jumlah murid di madrasah ibtidayah bertambah dari tahun sebelumnya. Jumlahnya menjadi 3.459 murid atau bertambah 1.132 murid. Pertumbuhan murid yang tinggi tahun 1992 adalah dampak dibukanya sepuluh madrasah baru pada tahun 1991. Penambahan jumlah murid masih terjadi di tahun berikutnya. Pada 1993, jumlah murid bertambah 59 orang dari tahun sebelumnya menjadi 3.518 murid. Jumlah tersebut bertahan sampai tahun 1994 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan kebijakan.

Pertumbuhan murid madrasah berbanding terbalik dengan murid sekolah umum. Tingginya minat terhadap madrasah mengakibatkan rendahnya jumlah murid sekolah umum. Namun, kebijakan pemerintah Kota Bogor untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-12 tahun dapat terwujud melalui madrasah ibtidayah. Pertambahan sekolah dan murid diiringi dengan penambahan jumlah guru. Pada 1989, jumlah guru madrasah ibtidayah adalah 89 orang. Pada tahun berikutnya jumlah tersebut terus meningkat. Tahun 1990-1991, jumlahnya mencapai 130 guru. Tahun berikutnya ketika jumlah madrasah ibtidayah bertambah sepuluh madrasah, jumlah guru yang tersedia meningkat sebanyak 159 orang menjadi 285 orang guru pada 1992. Namun, pada tahun berikutnya, jumlah tersebut kembali berkurang menjadi 245 orang pada 1993-1994.

Berkurangnya jumlah guru pada tahun terakhir pelaksanaan kebijakan tetap membuat rasio guru dan murid madrasah lebih baik daripada sekolah umum. Rasio guru dan murid madrasah pada 1994 adalah 1:14 sedangkan sekolah umum adalah 1:25 untuk negeri dan 1:31 untuk swasta. Kebijakan penambahan tenaga guru pada madrasah ibtidayah berjalan seiring dengan bertambahnya sekolah. Namun, pada tahun akhir pelaksanaan kebijakan jumlahnya menurun tetapi rasio guru dan murid tetap pada angka yang lebih baik dari sekolah umum.

Kebijakan perluasan kesempatan belajar, penambahan sekolah, dan guru berjalan dengan baik di madrasah. Jumlah murid madrasah cenderung meningkat sedangkan murid sekolah umum cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan karena jumlah madrasah yang lebih sedikit sehingga pengelola, dalam hal ini Departemen Agama dapat memberikan bantuan secara efektif. Bantuan berupa sarana dan prasarana serta tenaga teknik berhasil membuat madrasah banyak diminati oleh

masyarakat. Begitu pula dengan penyediaan sekolah dan guru, peningkatan signifikan terjadi di madrasah ibtidayah bukan sekolah umum.

Dinamika Pembangunan Madrasah Tsanawiyah di Kota Bogor pada PELITA V

Pendidikan menengah di madrasah terdiri dari dua jenjang yaitu sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi MTs di kota Bogor dari tahun ajaran 1989/1990 sampai 1993/1994.

Tabel 4. Jumlah Madrasah, Murid, dan Guru MTs Negeri dan Swasta di Kota Bogor 1989-1994

| TAHUN | Madrasah | | Murid | | Guru | | Rasio | |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta |
| 1989 | 3 | 5 | 2.222 | 782 | 52 | 61 | 42:1 | 12:1 |
| 1990 | 3 | 7 | 1.827 | 741 | 38 | 63 | 48:1 | 11:1 |
| 1991 | 3 | 7 | 1.827 | 741 | 45 | 63 | 40:1 | 11:1 |
| 1992 | 3 | 8 | 1.766 | 791 | 92 | 63 | 19:1 | 12:1 |
| 1993 | 1 | 8 | 1.766 | 1.450 | 93 | 224 | 19:1 | 6:1 |
| 1994 | 1 | 10 | 1.190 | 1.715 | 34 | 99 | 34:1 | 17:1 |

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas, jumlah MTs negeri cenderung tetap sedangkan swasta cenderung meningkat. MTs negeri jumlahnya tetap dari 1989 sampai 1992, yaitu tiga sekolah. Namun, jumlah tersebut turun menjadi satu sekolah pada 1993 dan 1994. MTs swasta jumlahnya justru meningkat. Pada 1989, jumlah MTs swasta adalah lima madrasah. Peningkatan terjadi pada tahun berikutnya, jumlah MTs menjadi tujuh madrasah. Sampai 1991, jumlah MTs swasta tetap tujuh madrasah. Tahun 1992, jumlah tersebut bertambah satu madrasah menjadi delapan madrasah sampai 1993. Minat masyarakat terhadap MTs swasta pada 1994 meningkat. Untuk mengimbangi itu, jumlah MTs swasta bertambah menjadi sepuluh madrasah.

Pertumbuhan jumlah sekolah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah murid. Pertumbuhan negatif MTs negeri mengakibatkan menurunnya jumlah murid. Pada 1989, jumlah murid MTs negeri adalah 2.222 orang. Jumlah tersebut menurun pada tahun berikutnya menjadi 1.827 orang yang bertahan sampai tahun 1991.

Jumlah madrasah yang tetap tidak menjadi jaminan jumlah murid tetap juga. Pada tahun 1992, jumlah MTs negeri tetap tiga madrasah tetapi jumlah murid kembali menurun menjadi 1.766 orang. Jumlah tersebut bertahan sampai tahun 1993. Setelah tahun 1993, jumlah murid kembali menurun menjadi 1.190 orang.

Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah MTs negeri menjadi satu madrasah.

Kondisi berbeda terjadi pada murid MTs swasta. Jumlah murid MTs swasta pada tahun 1989 adalah 782 orang. Tahun 1990-1991, jumlah tersebut berkurang menjadi 741 orang. Penurunan jumlah murid MTs swasta terjadi ketika jumlah madrasah meningkat. Tahun 1992, ketika jumlah MTs swasta kembali meningkat, jumlah muridnya juga turut meningkat. Murid MTs swasta pada 1992 jumlahnya 791 orang. Jumlah tersebut kembali bertambah pada 1993 sebanyak 659 orang. Tahun 1993, jumlah murid MTs swasta menjadi 1.450 orang. Jumlah ini meningkat meskipun jumlah madrasah tetap.

Minat masyarakat terhadap MTs swasta meningkat sampai tahun 1994. Pada tahun terakhir pelaksanaan kebijakan ini, jumlah murid MTs swasta adalah 1.715 orang. Peningkatan sebanyak 265 orang murid itu terjadi karena bertambahnya jumlah madrasah menjadi sepuluh. Peningkatan jumlah murid MTs swasta dan juga SLTP swasta menandakan keberhasilan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran serta pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan menengah pertama. Penambahan tenaga guru menjadi program pemerintah Kota Bogor selama 1989-1994. MTs sebagai salah satu penyelenggara pendidikan menengah pertama berkewajiban menjalankan program itu. Pada 1989, MTs negeri memiliki guru sebanyak 52 orang. Namun, pada tahun berikutnya, jumlah guru menurun menjadi 38 orang. Penurunan guru ini sejalan dengan menurunnya jumlah murid MTs negeri.

Pada 1991, jumlah guru MTs negeri mengalami peningkatan. Tahun ini, jumlah guru MTs negeri adalah 45 orang, bertambah tujuh orang dari tahun sebelumnya. Kebijakan penambahan guru mulai terlihat hasilnya pada tahun ini. Tahun 1992, jumlah guru MTs negeri kembali bertambah. Sebanyak 47 guru baru masuk mengajar di MTs negeri pada 1992. Dengan begitu, jumlah guru MTs negeri tahun 1992 adalah 92 orang. Pertumbuhan jumlah guru MTs negeri berlanjut hingga tahun 1993. Pada 1993, jumlah guru MTs negeri adalah 93. Jumlah tersebut merupakan jumlah paling tinggi selama masa pelaksanaan kebijakan. Pada 1994, jumlah guru MTs negeri menurun drastis menjadi 34 orang atau berkurang 59 orang dari tahun sebelumnya.

Berbeda dengan MTs negeri, jumlah guru MTs swasta cenderung meningkat. Pada 1989, jumlah guru MTs swasta adalah 61 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 63 orang pada tahun 1990 dan terus bertahan sampai tahun 1992. Penambahan kembali terjadi pada 1993, jumlah guru bertambah menjadi 224 orang. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi selama waktu pelaksanaan kebijakan. Namun, jumlah tersebut kembali turun menjadi 99 orang pada tahun 1994.

Penambahan jumlah guru baru terlihat pada tahun ketiga pelaksanaan kebijakan. Peningkatan guru secara konsisten terlihat pada MTs swasta. Hal itu seiring dengan penambahan jumlah sekolah dan murid. Kondisi berbeda terlihat pada jumlah guru MTs negeri. Peningkatan jumlah guru yang terjadi dari tahun

1991-1993 tidak terpengaruh oleh penurunan jumlah madrasah dan murid. Namun, tahun 1994 jumlah penurunan jumlah madrasah mempengaruhi jumlah guru MTs negeri.

Dinamika Pembangunan Madrasah Aliyah di Kota Bogor pada PELITA V

Gambaran statistik pendidikan tingkat menengah atas berupa madrasah aliyah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Jumlah Madrasah, Murid, dan Guru Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bogor 1989-1994

| TAHUN | Madrasah | Murid | Guru | Rasio |
|-------|----------|-------|------|-------|
| 1989 | 1 | 510 | 25 | 20:1 |
| 1990 | 1 | 510 | 25 | 20:1 |
| 1991 | 2 | 1.094 | 93 | 11:1 |
| 1992 | - | - | - | - |
| 1993 | 2 | 1.094 | 93 | 11:1 |
| 1994 | 2 | 1.530 | 71 | 21:1 |

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas, jumlah madrasah pada tahun pertama pelaksanaan kebijakan berjumlah satu madrasah. Jumlah madrasah meningkat pada tahun berikutnya. Pada 1991, jumlah madrasah bertambah satu menjadi dua madrasah. Jumlah tersebut bertahan sampai 1994. Kebijakan pemerintah untuk menambah sekolah berjalan pada MA negeri. Peningkatan jumlah madrasah tidak banyak. Alasannya, prioritas pembangunan pemerintah untuk pendidikan lanjutan atas adalah sekolah kejuruan.

Peningkatan jumlah madrasah berpengaruh kepada daya tampung MA. Pada 1989, jumlah murid MA adalah 510 orang. Jumlah ini bertahan sampai tahun 1990. Seiring dengan penambahan jumlah sekolah pada 1991, jumlah murid mengalami peningkatan. Tahun ini, murid yang mengikuti pendidikan di MA adalah 1.094 orang. Penambahan satu sekolah menambah 584 orang murid. Jumlah tersebut sama dengan jumlah pada tahun 1993.

Pada tahun 1994, jumlah murid MA kembali bertambah. Tahun ini, jumlah murid MA adalah 1.530 orang, bertambah 436 orang. Penambahan ini menandakan minat masyarakat terhadap madrasah meningkat sama seperti kondisi madrasah tsanawiyah. Upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar tingkat lanjutan atas terpenuhi oleh MA negeri. Walaupun tidak sebanyak daya tampung SLTA umum, MA tetap mampu menarik perhatian masyarakat.

Peningkatan jumlah sekolah berdampak langsung kepada jumlah guru. Pada tahun 1989-1990, jumlah guru MA adalah 25 orang. Jumlah ini bertambah pada 1991 dimana jumlah sekolah juga bertambah. Tahun ini, jumlah guru MA adalah

93 orang bertambah 68 orang dari tahun 1990. Jumlah tersebut sama dengan jumlah guru MA tahun 1992. Pada 1994, jumlah guru MA negeri mengalami penurunan. Peningkatan jumlah murid tidak berdampak pada jumlah guru. Tahun ini, jumlah guru MA negeri adalah 71 orang, menurun sebanyak 22 orang dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengakibatkan penurunan rasio guru dan murid. Pada tahun ini rasio guru dan murid adalah 1:21 menurun dari tahun sebelumnya yang memiliki rasio 1:11.

SIMPULAN

Dinamika pembangunan pendidikan agama, berupa madrasah di Kota Bogor tahun ajaran 1988/1989 dapat dirinci menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat pendidikan dasar, lanjutan pertama, dan lanjutan atas. Tingkat pendidikan dasar berupa MI. Tingkat pendidikan lanjutan pertama berupa MTs dan tingkat pendidikan lanjutan atas berupa MA. Untuk mengetahui kondisi umum ketiga tingkatan itu dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu sekolah, murid, dan guru.

Pada tingkat pendidikan dasar tahun 1988/1989, jumlah MI adalah 14 sekolah. Dari jumlah sekolah tersebut, murid yang bersekolah di MI adalah 1.764 orang. Guru yang tersedia untuk jenjang ini adalah 81 orang. Di tahun ini, swasta sudah terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tingkat selanjutnya adalah lanjutan pertama. Pada 1988/1989, jumlah MTs adalah 6 sekolah. Murid yang bersekolah di jenjang ini adalah 2.286 orang. Guru yang tersedia pada jenjang ini adalah 90 orang. Tingkat selanjutnya adalah lanjutan atas. Jumlah MA adalah tujuh sekolah. Murid yang menempuh pendidikan di jenjang ini adalah 5.561 orang untuk MA. Jumlah guru yang tersedia untuk MA adalah 110 orang.

Kondisi pendidikan tahun ajaran 1988/1989 masih ditemukan beberapa kekurangan. Dari ketiga jenjang pendidikan, permasalahan yang dihadapi adalah sama. Permasalahan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perluasan kesempatan belajar, penyediaan sekolah, dan penambahan guru. Permasalahan ini menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Bogor dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan. Dengan berpedoman pada rencana pembangunan pemerintah pusat dan kondisi lokal, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpusat pada empat hal. Pertama, perluasan kesempatan belajar dengan cara penambahan jumlah sekolah, pemberdayaan orang tua asuh, dan penyebarluasan program wajib belajar. Kebijakan kedua adalah penyediaan jumlah guru dengan cara menyederhanakan proses pengangkatan dan memanjangkan masa pengabdian guru. Ketiga, memperbanyak sekolah kejuruan untuk menanggulangi angkatan kerja yang belum terampil akibat lulusan SD/SLTP/SLTA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan. Terakhir, melibatkan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan cara memberi bantuan teknik, sarana dan prasarana, serta akreditasi.

Selama lima tahun penerapan kebijakan, pendidikan di Kota Bogor secara umum mengalami kemajuan. Secara rinci terdapat sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah murid. Keadaan orang tua yang tidak mampu tetap ditemui selama masa pelaksanaan kebijakan. Banyak sekolah swasta dan gurunya yang mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan hidup dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi, faktor penting yang sepatutnya diperhatikan dalam rangka pembangunan pendidikan adalah kondisi ekonomi masyarakat. Bila kondisi ekonomi masyarakat baik, kebijakan perluasan kesempatan belajar dapat berjalan efektif dan upaya untuk melibatkan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan akan direspon baik oleh swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (Penyunt.). (2005). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Pusat Statistik. (1988). *Jawa Barat Dalam Angka 1987*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1989). *Jawa Barat Dalam Angka 1988*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1990). *Jawa Barat Dalam Angka 1989*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1990). *Kota Bogor dalam Angka Tahun 1989*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1991). *Jawa Barat Dalam Angka 1990*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1992). *Jawa Barat Dalam Angka 1991*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1993). *Jawa Barat Dalam Angka 1992*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (1994). *Jawa Barat Dalam Angka 1993*. Badan Pusat Statistik.
- Bappeda Kota Bogor. (1989). *Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Lima-Kota DT II Bogor (1989/1990-1993/1994): Buku II Rencana Sektor Pembangunan*. Bogor: Bappeda Kota Bogor.
- Bappenas. (1989). *Repelita V: Buku II*. Jakarta: Bappenas Republik Indonesia.
- Case, K. E., & Flair, R. C. (2005). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. (B. Muhammad, Penerj.) Jakarta: Indeks.
- Drakeley, S. (2005). *The History of Indonesia*. Westport: Greenwood.
- Gottschalk, L. (2006). *Mengerti Sejarah*. (N. Notosusanto, Penerj.) Jakarta: UI Press.

- Gunardi, T., & Wijaya, J. (1997). *Perkembangan Pendidikan di Jawa Barat*. Bandung: Armico.
- Herlina, N. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Illich, I. (2000). *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. (S. A. Keraf, Penerj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirjdo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Prayogi, A. (2022). Perspektif Filosofis dalam Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 23(2), 23-32.
- Prayogi, A. (2022). TELAAH KONSEPTUAL PENDEKATAN KUANTITATIF DALAM SEJARAH. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 8(1).
- Prayogi, A. (2023). The Role of History as a Science in Sustainable Development. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(1), 16-23.
- Ricklefs, M. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Basingstoke: Palgrave.
- Said, M., & Mansoer, D. (1959). *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Pustaka Rakjat.
- Sholeh, M. (2007). *Cita-Cita Realita Pendidikan; Pemikiran dan Aksi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: IPE.
- Siagian, S. P. (1982). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simandjuntak, B., & Pasaribu, I. (1986). *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Tarsito.
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tikson, D. T. (2005). *Keterbelakangan dan Ketergantungan: Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. Makassar: Inninawa.
- Tirtosudarmo, R. (1994). *Dinamika Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Perkotaan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zakaria, M. M. (2010). *Kota Bogor; Studi tentang Perkembangan Ekologi Kota Abad ke-19 hingga ke-20*. Sumedang: Sastra Unpad Press: Sastra Unpad Press.

